



## Perbandingan Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia dan Vietnam

Yulia Eka Wulandari<sup>1)</sup>, Windy Annisa<sup>2)</sup>, Gun Gun Gumilar<sup>3)</sup> Dewi Noor Azijah<sup>4)</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat

[yuliaekaw1@gmail.com](mailto:yuliaekaw1@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[windyannisa6@gmail.com](mailto:windyannisa6@gmail.com)<sup>2)</sup>  
[gungun.gumilar@fisip.unsika.ac.id](mailto:gungun.gumilar@fisip.unsika.ac.id)<sup>3)</sup>  
[dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id](mailto:dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id)<sup>4)</sup>

### Abstract

*Concerning the food problem that could pose a hazard during the Covid-19 pandemic, the Food and Agriculture Organization (FAO) issued a warning. Indonesia and Vietnam are two nations that are attempting to act quickly and appropriately to avert a food crisis. The objective of this study is to compare and contrast the food security measures that the governments of Vietnam and Indonesia adopted during the Covid-19 outbreak. The findings of this study show that there are disparities between the approaches taken by the governments of Vietnam and Indonesia to this issue, which is brought on by the different political structures and circumstances in each nation. In order to prevent food crises by preserving food price stability, the Indonesian government developed numerous new regulations. In order to prevent food crises, the Indonesian government created a number of new policies, including ones that encourage small farmers, increase crop production, and create food estates. The food security strategy in Vietnam exempts farmers from agricultural taxes, waives the cost of irrigation, and reduces post-harvest losses by paying loan interest. In contrast to Vietnam, where the government effectively implements current policies and is hereditary in nature, Indonesia develops new policies by modifying the circumstances that exist. This results in long-term effects for the Vietnams government.*

**Key words:** Covid-19, Food Security, Indonesia, Vietnam

### PENDAHULUAN

Dunia dihebohkan dengan kemunculan sebuah wabah virus menjelang berakhirnya tahun 2019, wabah ini bernama Covid-19 bersifat menular yang diakibatkan oleh virus SARS-COV-2. Hampir semua orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami kesulitan bernafas, mulai dari gejala ringan hingga berat sehingga membutuhkan perawatan khusus. Kelompok yang rawan tertular yaitu orang yang lanjut usia serta mereka yang memiliki penyakit bawaan memerlukan perhatian khusus karena dengan tertularnya virus ini maka akan mengakibatkan sakit yang lebih parah atau bahkan meninggal dunia. Penyebaran virus dapat berasal dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi. Adapun media penyebarannya berupa partikel cairan sehingga ketika penderita berbicara, bernapas atau mengalami batuk virus tersebut dapat menyebar luas (WHO, 2019)

Cara terbaik untuk mencegah dan mengurangi angka laju pertumbuhan virus ini yaitu dengan pembatasan kegiatan dan interaksi di luar rumah (WHO, 2019). Beberapa negara mengambil langkah untuk menghadapi virus ini, salah satunya yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan di luar rumah hingga pemberlakuan *lockdown* (Tim Detik.com, 2020). Akibatnya, banyak masyarakat yang mengalami kepanikan sebab pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Hal tersebut terlihat dari perilaku masyarakat yang berbondong-bondong membeli persediaan pangan (Healthy Lifestyle, 2022).

Pandemi Covid-19 ini berdampak pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, hingga sektor lainnya (Aeni, 2021). Pada sektor pertanian, *Food and Agriculture Organization* (FAO) telah memperingatkan mengenai potensi krisis pangan global. Rantai persediaan pangan global terancam akibat pembatasan sosial yang diberlakukan oleh setiap negara. Kebijakan tersebut berimplikasi pada kebijakan pangan serta kemampuan produksi pangan (Fatanah, 2020).

Pembatasan kegiatan di luar rumah hanya efektif jika ketersediaan pangan terjamin, sebab dampak yang perlu diantisipasi dari pemberlakuan kebijakan tersebut adalah ketersediaan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ketahanan pangan dari setiap negara haruslah disertai dengan dukungan dari semua pihak terutama petani sebagai produsen kesediaan pangan. Sebab semakin nyata dampak dari pandemi Covid-19 dan memburuknya sektor pertanian di tingkat global mengharuskan setiap negara mengambil sebuah tindakan nyata untuk mempertahankan kesediaan pangan (Harian Kontan, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pinasthika dan Reni Erlita yang berjudul "Analisis Perbandingan Kebijakan Pertanian Vietnam dan Indonesia dalam Mencapai Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018" dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia dengan Vietnam dalam kurun waktu 4 tahun tersebut melakukan berbagai kebijakan untuk mempertahankan ketahanan pangan (Erlita, 2019).

Kebijakan pemerintah Indonesia sendiri mengenai ketahanan pangan tercermin dalam Repelita (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019). Dalam sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan (nawacita) ketahanan pangan masuk ke dalam salah satu prioritas pembangunan (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019). Ketahanan pangan tercermin dalam nawacita Kementerian Pertanian yaitu dilaksanakannya program peningkatan produksi pangan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Messerli et al., 2019) yang berjudul "*Vietnam Food Security Policy Review*" yang menjelaskan bahwa ketahanan pangan Vietnam dilakukan melalui 4 cara yaitu pembangunan pertanian dan peningkatan produktivitas pangan, terobosan dalam produktivitas, restrukturisasi ekonomi pertanian dan pedesaan serta strategi pembangunan pedesaan yang baru. Namun tentu saja dengan adanya pandemi Covid-19 sedikit banyaknya merubah rencana yang telah disusun oleh pemerintah terkait untuk beberapa tahun ke depan. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Untuk itu pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis perbandingan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia maupun Vietnam untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam situasi pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun tidak tertulis yang berupa data kata, kalimat, maupun gambar dan bukan merupakan data angka. Data tersebut dapat berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo, serta dokumen resmi lainnya. Sementara menurut (Wekke, 2020) metode komparatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel atau lebih pada suatu objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Organisasi Pangan dan Pertahanan Dunia (FAO), ketahanan pangan merupakan suatu kondisi setiap orang dapat memperoleh pangan di setiap waktunya dengan tujuan berkehidupan yang sehat. Terwujudnya ketahanan pangan disebabkan karena adanya kolaborasi antara subsistem yang meliputi (a) subsistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari dalam negeri, maupun cadangan yang berasal dari impor; (b) subsistem distribusi mencakup aksesibilitas pangan antarwilayah dan antar waktu, serta stabilitas harga pangan; (c) subsistem konsumsi mencakup jumlah mutu gizi atau nutrisi, keamanan dan keragaman konsumsi pangan, sehingga pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari ketiga subsistem tersebut (Ketaren, 2015).

Pemberlakuan pembatasan kegiatan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Vietnam selama pandemi Covid-19 menghambat proses pembangunan ketahanan pangan. Namun kedua negara ini telah merumuskan kebijakan pendukung lainnya untuk memastikan tetap berjalannya pembangunan ketahanan pangan.

### Kebijakan Negara Indonesia

Petani merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan, sebab ketahanan pangan sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 subsistem, diantaranya yaitu ketersediaan

pangan, keterjangkauan pangan, dan konsumsi pangan (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019). Namun, krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 tidak hanya mempengaruhi konsumsi rumah tangga akan pangan tetapi juga mempengaruhi kemampuan para petani untuk memproduksi pangan melalui tanam dan panen. Indonesia hampir bergantung sepenuhnya terhadap produksi makanan dalam negeri, sehingga dengan adanya kebijakan larangan ekspor beras yang diberlakukan di negara India dan Vietnam mengakibatkan Indonesia perlu memastikan agar petani skala kecil tidak melewatkan musim tanam. Hal ini merupakan sesuatu yang penting karena mayoritas petani akan mengalami kesulitan dalam memperoleh hasil tanam (Sandi, 2020).

Peran ketersediaan bahan pangan pokok sangat penting dalam situasi pandemi Covid-19, sebab hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar seluruh masyarakat, sehingga apabila tidak dikelola secara baik mengakibatkan sebuah krisis pangan. Kebijakan pembatasan sosial yang diambil oleh pemerintah tentu akan berdampak pada ketersediaan bahan pangan, walaupun pada faktanya kuantitas konsumsi masyarakat akan tetap sama dengan adanya pembatasan tersebut.

Kestabilan harga pangan pokok sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan bahan pangan pokok. Pada April 2020 persediaan pangan pokok Indonesia mengalami defisit di beberapa wilayah. Masalah utama yang perlu menjadi bahan pertimbangan para pemangku kebijakan yaitu rendahnya produktivitas di beberapa wilayah. Adapun wilayah-wilayah yang mengalami tingkat produktivitas rendah adalah wilayah yang memiliki tingkat produksi padi lebih rendah dibanding rata-rata produksi wilayah (Asmanto et al., 2020). Untuk itu dalam upaya menjaga ketahanan pangan Indonesia, maka pemerintah perlu memberikan stimulus pada sektor pertanian sehingga produksi tanam utama meningkat. Kebijakan ketahanan pangan dalam situasi pandemi Covid-19 terbagi menjadi 3 (Darma, 2020).

1. *Emergency Agenda (food price stability) → short term*
2. *Temporary Agenda (local food diversification) → medium term*
3. *Permanent Agenda (extensification of food crops) → long term*

Tabel 1.  
Strategi Kebijakan Ketahanan Pangan

No.	Short Term	Medium Term	Long Term
1.	<i>Price control</i>	<i>Production based on people's agriculture</i>	<i>Inrears producing per year</i>
2.	<i>Farmer financing facilities</i>	<i>Supporting deficit areas</i>	<i>Developing agricultural corporations</i>
3.	<i>Labor-intensive agriculture</i>	<i>Anticipating drought</i>	<i>Strengthening millennial farmer</i>

Sumber: Penelitian Darma, 2020

Strategi pertama yaitu dengan melakukan stabilitas harga pangan dengan mempertimbangkan ketersediaan pangan nasional. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan strategi untuk menjaga stabilitas harga pangan sehingga tidak melonjak tinggi dengan tetap memperhatikan peningkatan produksi pangan yang didorong oleh produktivitas petani kecil (Workie et al., 2020). Salah satu implementasi kebijakan tersebut yaitu dengan diberlakukannya *new normal* untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Namun tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah menjaga ketahanan pangan dengan tetap memperhatikan pemulihan ekonomi negara.

Strategi kedua yaitu dengan meningkatkan pangan melalui produksi pertanian serta mendukung petani kecil. Hal tersebut diimplementasikan melalui pengoptimalan peran penyuluh (Warsana, 2008) namun melihat situasi dan kondisi seharusnya hal tersebut tidak menjadi penghambat bagi penyuluh untuk ikut serta mendampingi petani kecil. Strategi ini akan berhasil jika ditunjang dengan pemerintah daerah yang ikut serta membantu dengan mendorong pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan ini akan meningkatkan upaya pemberdayaan keluarga dalam bercocok tanam dan pengolahan hasil tanam. Sebab dalam situasi pandemi ini, masyarakat diarahkan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan pokoknya secara mandiri untuk menghindari kerawanan pangan.

Strategi ketiga yaitu dengan meningkatkan jumlah tanaman pangan. Dukungan terhadap hal ini disertai dengan basis kearifan lokal akan memperkuat sistem logistik dan cadangan pangan daerah. Melalui pertanian modern maka akan mendorong *smart farming* yaitu pemanfaatan lahan pertanian rumah untuk meningkatkan produksi pangan utama. Dalam strategi ini diharapkan dapat mencapai produksi nasional sebesar 7% per tahun serta mengurangi kerugian sektor pertanian hingga angka 5% (Darma, 2020).

Pangan lokal dalam situasi pandemi Covid-19 berperan sebagai : (a) sumber keragaman bahan pangan untuk mencapai ketahanan pangan serta gizi keluarga (b) sebagai hasil dari kreativitas budaya serta kearifan lokal dalam upaya mengoptimalkan ketersediaan pangan (c) sebagai upaya untuk menjaga pasokan pangan bagi para petani yang mengalami guncangan (d) sebagai salah satu upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga adanya pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Darma, 2020). Menurut (Firdaus, 2020) terdapat 4 prinsip pangan lokal sebagai ketahanan pangan, yaitu : (a) budidaya menerapkan kearifan lokal (b) lestari yaitu menghasilkan sedikit limbah sehingga ramah lingkungan (c) hasil pangan mengedepankan aspek kesehatan yaitu bergizi, berkualitas, segar, bersih, dan aman (d) mempunyai nilai keadilan yaitu tersedia dalam kuantitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, mudah dijangkau, bermutu, dan lain sebagainya.

Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu pembangunan *food estate* (lumbung pangan). Pada tanggal 9 Juli 2020 Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai penanggung jawab pembangunan *food estate* seluas 178 ribu hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pisau, Kalimantan Tengah (Aud, 2020). Pengangkatan ini memperlihatkan bahwa masalah ketahanan pangan tidak hanya menjadi urusan pemenuhan kebutuhan pangan saja, melainkan juga merupakan bagian dari ketahanan nasional. Tujuan dari pembangunan ini nantinya dapat menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa serta menjadi salah satu program strategis nasional. *Food estate* merupakan salah satu kebijakan strategis yang bertujuan untuk mencegah krisis pangan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

### **Kebijakan Negara Vietnam**

Pada umumnya kebijakan ketahanan pangan negara Vietnam dari tahun ke tahun tidak banyak melakukan perubahan, berbeda dengan Indonesia yang melakukan perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian Presiden. Sebab di negara Indonesia, setiap Presiden memiliki kebijakan masing-masing untuk menangani masalah-masalah yang ada.

Kemajuan industrialisasi dan modernisasi di Vietnam telah memberikan tekanan yang signifikan pada sektor pertanian dalam hal konversi lahan dan pembangunan infrastruktur. Kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam telah menurun persentasenya, tetapi peran pertanian dalam penciptaan lapangan pekerjaan serta produksi pangan bagi penduduk miskin di daerah pedesaan sangatlah penting. Sektor pertanian menyediakan lapangan pekerjaan kepada sekitar 24 juta orang, apabila dipersentasekan sebesar 42% dari total lapangan pekerjaan di negara Vietnam (Petersen, 2017).

Sebelumnya pemerintah Vietnam telah mengetahui beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai ketahanan pangan pada abad ke-21 (Petersen, 2017) yaitu : (1) menurunnya lahan pertanian yang tersedia akibat urbanisasi dan industrialisasi (2) perubahan iklim global (3) pendapatan rendah dengan garis kemiskinan mencapai 12% penduduk (4) akses terhadap pangan. Melihat tantangan-tantangan tersebut, maka diperlukan peningkatan kerja sama internasional. Setelah lebih dari 20 tahun reformasi ekonomi, Vietnam telah mencapai perbaikan yang signifikan dalam ketahanan pangan nasional, disertai dengan dampaknya terhadap pembangunan.

Kebijakan ketahanan pangan negara Vietnam pada tahun 2020 telah direncanakan sejak tahun 2012. Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD) bekerja sama dengan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merumuskan perencanaan dan pengembangan pertanian yang diwujudkan dalam Keputusan Nomor 124/QD-TTg mengenai penetapan wilayah produksi untuk setiap tanaman dan orientasi pengembangan intensif produk untuk setiap wilayah. Adapun untuk lebih memperkuat pembangunan sektor pertanian, pada tahun 2013 Perdana Menteri mengeluarkan Keputusan No. 899/QD-TTg yang menyetujui restrukturisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan memelihara pembangunan berkelanjutan. Pemerintah secara bersamaan mengumumkan tujuan, pandangan, isi dan langkah-langkah khusus untuk mengembangkan sektor pertanian di periode baru. Ini dianggap sebagai usulan yang sangat penting untuk merangsang ekonomi pertanian (Petersen, 2017).

Perdana Menteri menyetujui keseluruhan perencanaan pembangunan ekonomi di wilayah utara tengah dan pantai tengah hingga tahun 2020. Beberapa putusan pendukung hal tersebut yaitu sebagai berikut (Petersen, 2017):

1. Keputusan Nomor 1874/QD/TTg yaitu mengenai persetujuan ekonomi wilayah pusat secara keseluruhan hingga tahun 2020
2. Keputusan Nomor 245/QD-TTg yaitu persetujuan mengenai pembangunan ekonomi Delta Mekong secara keseluruhan hingga tahun 2020. Dalam rencana ini akan memfokuskan pada intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan peningkatan kualitas beras.

Oleh sebab itu, pada tahun 2020 Vietnam hanya menikmati hasil dari perencanaan yang telah dilakukan sejak tahun 2012, sehingga pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi ketersediaan pangan

negara tersebut. Kebijakan yang diambil Vietnam dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19 yaitu menghentikan kegiatan ekspor bahan pangan, sebab pemerintah Vietnam lebih mendahulukan stok atau ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat dalam negeri (Sandi, 2020). Tentu saja hal ini berdampak pada negara-negara yang mengimpor bahan pangan dari Vietnam, sehingga banyak negara yang memilih untuk menghapuskan biaya impor agar negara-negara pengekspor bahan pangan tetap dapat mengirimkan bahan pangan serta menjamin ketersediaan pangan negara lain.

Untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pada sektor pangan, maka pemerintah Vietnam memperhatikan pembangunan lain yang mendukung, seperti pembangunan infrastruktur irigasi yang sangat penting pada sektor pangan. Membangun infrastruktur irigasi untuk produksi pertanian yang berkelanjutan merupakan prioritas untuk ketahanan pangan. Resolusi 63/NQ-CP meluncurkan tiga tindakan utama untuk meningkatkan dan membangun pekerjaan irigasi baru (Petersen, 2017):

1. Investasi berkelanjutan, pembangunan dan perbaikan sistem irigasi untuk memastikan semua lahan sawah diairi dan untuk meningkatkan daerah irigasi untuk tanaman sayuran dan buah-buahan; pembangunan irigasi untuk melayani budidaya dan pekerjaan irigasi kecil di daerah pegunungan juga diprioritaskan;
2. Investasi berkelanjutan dalam peningkatan dan pembangunan tanggul baru di sepanjang sistem irigasi yang ada untuk melindungi aset dan manusia dari kenaikan permukaan laut; dan
3. Melengkapi sistem irigasi untuk daerah produksi pangan yang seiring dengan peningkatan mekanisasi untuk efisiensi produksi pangan.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam menjaga ketahanan pangan di saat pandemi Covid-19 yaitu dengan mendukung para petani kecil yang diwujudkan melalui beberapa kebijakan, sebagai berikut (Petersen, 2017):

1. Pembebasan pajak pertanian

Dengan tujuan untuk mendorong pembangunan pertanian, Majelis Nasional mengeluarkan resolusi tentang pembebasan pajak atas tanah pertanian

2. Pembebasan biaya irigasi

Tujuan dari pembebasan biaya irigasi adalah untuk membantu petani mengurangi biaya produksi. Namun, pengecualian tersebut telah menimbulkan moral hazard bagi petani. Karena air disediakan dengan harga yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, petani tidak menggunakan air secara efisien atau tepat. Misalnya, padi perlu dikeringkan selama beberapa tahun, tetapi beberapa petani diketahui menggenangi tanaman padi sepanjang tahun. Air dari saluran irigasi terkadang dialirkan ke saluran drainase daripada digunakan efisien untuk produksi beras.

3. Mengurangi kerugian pasca panen

Negara Vietnam membantu pembelian mesin dan peralatan untuk mengurangi kerugian pasca panen dengan menutupi bunga pinjaman komersial. Pinjaman maksimum yang ditentukan dalam keputusan adalah 100% dari nilai barang. Negara menanggung 100% bunga dalam dua tahun pertama dan 50% pada tahun ketiga.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Vietnam merupakan contoh negara di ASEAN yang tengah dihadapi pada permasalahan ketahanan pangan akibat pandemi Covid-19. Namun, keduanya memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi masalah tersebut. Perbedaan ini diakibatkan oleh sistem pemerintah serta kondisi masing-masing negara. Adapun perbedaan yang terlihat yaitu kebijakan ketahanan pangan Indonesia berubah menyesuaikan pergantian pemimpin. Pandemi Covid-19 menyebabkan Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru untuk mengatasi kerawanan pangan dengan menyesuaikan situasi yang terjadi. Berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Vietnam lebih siap dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan saat pandemi, sebab kebijakan ketahanan pangan Vietnam bersifat turunan dimana kebijakan dari pemimpin sebelumnya dilanjutkan oleh pemimpin di masa mendatang. Pada tahun 2012, pemerintah Vietnam telah merumuskan sejumlah kebijakan sehingga pada tahun 2020 negara Vietnam dapat menikmati hasil dari perencanaan kebijakan ketahanan pangan yang telah dibuat pada tahun 2012.

Dengan demikian pada dasarnya kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut cukup solutif dalam mempertahankan ketahanan pangan selama pandemi Covid-19. Pemerintah Vietnam membuat perencanaan kebijakan ketahanan pangan secara berkesinambungan dari masa ke masa sehingga perencanaan kebijakan yang telah dirancang dapat dinilai efektif. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang cenderung berubah sehingga menjadikan kebijakan



tersebut kurang efektif. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan setiap kebijakan yang dikeluarkan agar tidak hanya sekedar solutif tetapi kebijakan tersebut juga efektif untuk diterapkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1), 17–34. <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>
- Asmanto, P., Adji, A., & Sutikno. (2020). Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19. *Bhirawa Online*, 1–8. <http://tnp2k.go.id/download/92111PB8KetahananPanganFA-Jul2020.pdf>
- Aud. (2020). *Jokowi Tunjuk Prabowo Bangun Food Estate 178 Ribu Ha*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200709180335-92-522917/jokowi-tunjuk-prabowo-bangun-food-estate-178-ribu-ha>
- Darma, S. (2020). Food Security Management for Indonesia: The Strategy during the Covid-19 Pandemic. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 8(4), 371–381. <https://doi.org/10.2478/mdke-2020-0024>
- Erlita, P. R. (2019). *Analisis Perbandingan Kebijakan Pertanian Vietnam dan Indonesia dalam Mencapai Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018*. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20333>
- Fatanah, T. (2020). *Waspada! FAO Ingatkan Potensi Krisis Pangan Negara Covid-19*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200330165721-4-148527/waspada-fao-ingatkan-potensi-krisis-pangan-gegara-covid-19>
- Firdaus. (2020). *Pangan Lokal di Tengah Pandemi Covid-19*. Pangan Publik Nusantara. <https://panganbijak.org/pangan-lokal-di-tengah-pandemi-covid-19/>
- Harian Kontan. (2020). *Darurat Pangan Saat Pandemi Covid-19*. Harian Kontan. <https://analisis.kontan.co.id/news/darurat-pangan-saat-pandemi-covid-19>
- Healthy Lifestyle. (2022). *Mengenal Panic Buying dan Panic Selling di Masa Pandemi Covid-19*. Healthy Lifestyle. <https://www.generali.co.id/id/healthyliving/detail/819/mengenal-panic-buying-dan-panic-selling-di-masa-pandemi-covid-19>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2019). *Esensi Kebijakan Pangan Era Amran: Sayangi Petani*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3219>
- Ketaren, A. (2015). *Modal Sosial Petani Dalam Pertanian Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Daerah*. Unimal Press.
- Messerli, P., Kim, E. M., Lutz, W., Moatti, J. P., Richardson, K., Saidam, M., Smith, D., Eloundou-Enyegue, P., Foli, E., Glassman, A., Licon, G. H., Murniningtyas, E., Staniškis, J. K., van Ypersele, J. P., & Furman, E. (2019). Expansion of sustainability science needed for the SDGs. *Nature Sustainability*, 2(10), 892–894. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0394-z>
- Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Petersen. (2017). Vietnam food security policy review. *ACIAR Monograph No. MN196*, 67–73. [https://www.aciar.gov.au/node/13441%0Ahttp://aciarc.gov.au/files/vietnam\\_food\\_security\\_policy\\_web.pdf](https://www.aciar.gov.au/node/13441%0Ahttp://aciarc.gov.au/files/vietnam_food_security_policy_web.pdf)
- Sandi, F. (2020). *Vietnam & India Mulai Larang Ekspor Pangan, Tanda Apa?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200618075159-4-166173/vietnam-india-mulai-larang-ekspor-pangan-tanda-apa>
- Tim Detik.com. (2020). *Daftar Negara yang Lockdown karena Corona*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4956298/daftar-negara-yang-lockdown-karena-corona>
- Warsana, S. P. (2008). Strategi Melakukan Penyuluhan Pertanian untuk Petani “Kecil.” *Jawa Tengah: BPTP Jawa Tengah, Tabloid Sinar Tani*, 9.
- Wekke, I. S. (2020). *Metode Penelitian Sosial* (Issue October 2019).
- WHO. (2019). *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus*. World Health Organization. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>
- Workie, E., Mackolil, J., Nyika, J., & Ramadas, S. (2020). Deciphering the impact of COVID-19 pandemic on food security, agriculture, and livelihoods: A review of the evidence from developing countries. *Current Research in Environmental Sustainability*, 2, 100014. <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2020.100014>